

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat selesai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pangkalpinang, 19 Juli 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG



M.AGUS SALIM,S.T.
PEMBINA TINGKAT I / IV b
NIP. 197407162005011008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

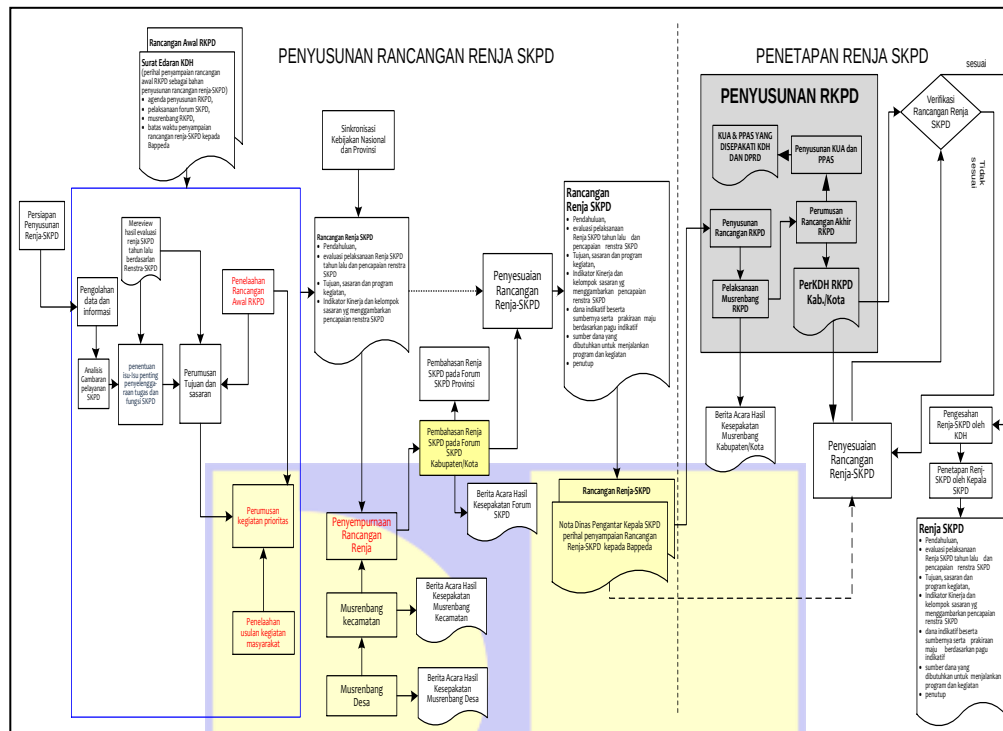
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013

- tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
17. Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, meliputi :

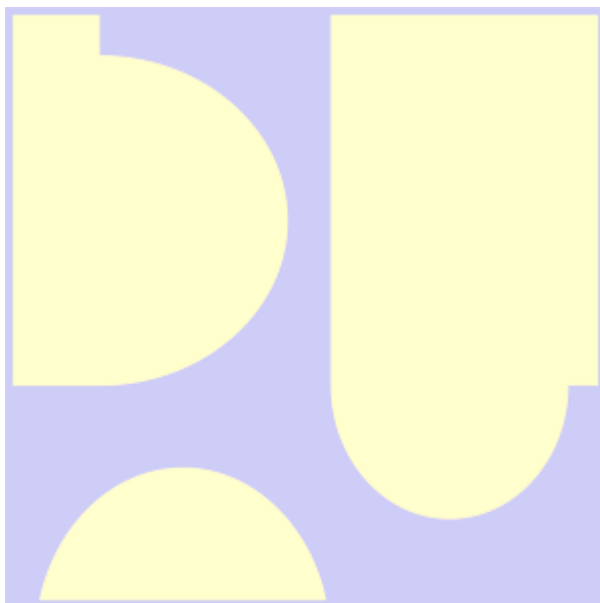
- | | |
|---------|--|
| BAB I | <p>Pendahuluan</p> <p>Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan</p> |
| BAB II | <p>Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu</p> <p>Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.</p> |
| BAB III | <p>Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan</p> <p>Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan</p> |
| BAB IV | <p>Rencana Kerja dan Pendanaan</p> <p>Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan OPD</p> |
| BAB V | <p>Penutup</p> |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Tahun 2024 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :



TABEL 2.1**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA)****Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang s.d 2024 (Triwulan 2)**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	29.217.345.126	0	0	60	7.820.284.059	24,990	2.222.704.069	24,990	1.949.277.487	0	0	0	0	49,980	4.171.981.556	49,980	4.171.981.556	100	14,279	SEKRETARIS (PUPR)
2		010301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	30.000.000	0	0	100	8.000.000	25	2.800.000	0	0	0	0	0	0	25	2.800.000	25	2.800.000	100	9,333	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
3		010301201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	15.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag. Keuangan PEP dan
4		010301201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag. Keuangan PEP dan

5		010301201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.000.000	0	0	4	2.800.000	1	2.800.000	0	0	0	0	0	0	1	2.800.000	1	2.800.000	100	18,667	Kasubbag. Keuangan	PEP	dan
6		010301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersumnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	15.642.083.743	0	0	100	6.361.878.423	24,990	2.037.944.805	24,990	1.713.932.401	0	0	0	0	49,980	3.751.877.206	49,980	3.751.877.206	100	23,986	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan		
7		010301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	15.612.083.743	0	0	58	6.361.878.423	58	2.037.944.805	58	1.713.932.401	0	0	0	0	58	3.751.877.206	58	3.751.877.206	100	24,032	Kasubbag. Keuangan	PEP	dan
8		010301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	0	2.007.187.200	0	0	100	553.688.500	24,990	43.456.884	24,990	112.308.339	0	0	0	0	49,980	155.765.223	49,980	155.765.223	100	7,760	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan		
9		010301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.900.000	0	0	5	20.300.000	0	0	4	5.300.000	0	0	0	0	4	5.300.000	4	5.300.000	100	33,333	Kasubbag. Keuangan	PEP	dan
10		010301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	227.544.500	0	0	60	98.688.500	0	0	40	38.654.000	0	0	0	0	40	38.654.000	40	38.654.000	100	16,987	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan		
11		010301206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	75.000.000	0	0	5	31.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan		
12		010301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	750.000.000	0	0	12	400.000.000	3	43.456.884	3	68.354.339	0	0	0	0	6	111.811.223	6	111.811.223	100	14,908	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan		
13		010301206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan		
14		010301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	0	8.696.476.500	0	0	100	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan		

15		010301207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	3.500.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
16		010301208	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	0	2.352.797.683	0	0	100	632.135.440	24,990	120.774.463	24,990	84.852.121	0	0	0	0	49,980	205.626.584	49,980	205.626.584	100	8,740						Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
17		010301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	876.257.683	0	0	1	216.000.000	3	27.423.527	3	22.581.121	0	0	0	0	6	50.004.648	6	50.004.648	100	5,707						Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
18		010301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	57.500.000	0	0	2	3.918.300	0	0	0	0	2	3.918.300	2	3.918.300	100	100						Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
19		010301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.476.540.000	0	0	1	358.635.440	2	93.350.936	3	58.352.700	0	0	0	0	5	151.703.636	5	151.703.636	100	10,274						Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
20		010301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	244.581.696	24,990	17.727.917	24,990	38.184.626	0	0	0	0	49,980	55.912.543	49,980	55.912.543	100	100						Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
21		010301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	62.681.696	1	6.232.924	1	9.349.306	0	0	0	0	1	15.582.230	1	15.582.230	100	100						Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
22		010301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	7	181.900.000	6	11.494.993	6	28.835.320	0	0	0	0	6	40.330.313	6	40.330.313	100	100						Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	14,279							
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR							
23	-	010302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:%)	0	33.196.925.217	0	0	32,020	4.119.026.448	0	187.664.484	26,830	494.616.784	0	0	0	0	26,830	682.281.268	26,830	682.281.268	100	2,055					Bidang Sumber Daya Air	

24		010302201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kawasan kabupaten/kota (Dengan Satuan:ha)	0	33.196.925.217	0	0	375,840	4.119.026.448	0	187.664.484	0	494.616.784	0	0	0	0	0	682.281.268	0	682.281.268	0	2,055	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
28	-	010303	P R O G R A M PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlingkungan (Dengan Satuan:%)	0	11.650.040.000	0	0	31,300	391.889.800	0	9.930.398	92	10.485.000	0	0	0	0	92	20.415.398	92	20.415.398	100	0,175	Bidang Sumber Daya Air
29		010303201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun (Dengan Satuan:%)	0	11.650.040.000	0	0	100	391.889.800	0	9.930.398	0	10.485.000	0	0	0	0	0	20.415.398	0	20.415.398	0	0,175	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
30		010303201028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			0		0		391.889.800		9.930.398		10.485.000	0		0			20.415.398		20.415.398		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	0,175	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
31	-	010305	P R O G R A M PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	85	1.107.898.284	24,990	51.850.468	24,990	76.780.312	0	0	0	0	49,980	128.630.780	49,980	128.630.780	100	100	Bidang Cipta Karya
32		010305201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses sanitasi yang terintegrasi dan terdistribusi di lokasi pemukiman pelayanan dasar menggunakan SPALD S (Dengan Satuan:Rumah)	0	0	0	0	550	1.107.898.284	0	51.850.468	0	76.780.312	0	0	0	0	0	128.630.780	0	128.630.780	0	100	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
33		010305201013	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	361.592.284	0	51.850.468	4	66.295.312	0	0	0	0	4	118.145.780	4	118.145.780	100	100	Sub Koordinator Teknik Penyelesaian Lingkungan Ahli Muda
34		010305201041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			0		0		746.306.000		0		10.485.000		0		0		10.485.000		10.485.000		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	

PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		
35	-	010306	P R O G R A M PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air (Dengan Satuan:%)	0	47.542.435.414	0	0	10	10.862.763.152	0	152.244.328	0	1.436.749.952	0	0	0	0	0	1.588.994.280	0	1.588.994.280	0	3,342	Bidang Sumber Daya Air
36		010306201	Pengelolaan dan P e n g e m b a n g a n Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam D a e r a h Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan P e m e l i h a r a a n Drainase Dalam kota (Dengan Satuan:%)	0	47.542.435.414	0	0	100	10.862.763.152	0	152.244.328	0	1.436.749.952	0	0	0	0	0	1.588.994.280	0	1.588.994.280	0	3,342	Sub Koordinator Teknik Pengaliran Ahli Muda
37		01030620100 5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (D e n g a n Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	0	29.550.454.814	0	0	59,42 0	7.349.121.000	0	0	18	772.122.400	0	0	0	0	18	772.122.400	18	772.122.400	100	2,613	Sub Koordinator Teknik Pengaliran Ahli Muda
38		01030620102 8	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			0		0		3.513.642.152		152.244.328		664.627.552		0		0		816.871.880		816.871.880		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						0,000	3,342		
PREDIKAT KINERJA																						SR	SR		
39	-	010308	P R O G R A M P E N A T A A N B A N G U N A N GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota (D e n g a n Satuan:%)	0	68.899.410.102	0	0	25	7.704.264.676	0	71.728.616	0	183.686.696	0	0	0	0	0	255.415.312	0	255.415.312	0	0,371	Bidang Cipta Karya
40		010308201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (D e n g a n Satuan:Dokumen)	0	68.899.410.102	0	0	250	7.704.264.676	0	71.728.616	0	183.686.696	0	0	0	0	0	255.415.312	0	255.415.312	0	0,371	Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
41		01030820102 1	P e m b a n g u n a n , P e m a n f a a t a n , Pelestarian dan P e m b o n g k a r a n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			0		0		7.548.039.676		71.728.616		134.686.696		0		0		206.415.312		206.415.312		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42		01030820102 3	Penyelenggaraan P e n e r b i t a n Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti K e p e m i l i k a n Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			0		0		156.225.000		0		49.000.000		0		0		49.000.000		49.000.000		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						0,000	0,371		
PREDIKAT KINERJA																						SR	SR		

43	-	010310	P R O G R A M PENYELENGGARAAN JALAN	T i n g k a t Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (D e n g a n Satuan:%)	95, 500	84.021.913.092	0	0	94,1 00	23.785.447.112	0	172.991.404	93,910	422.147.306	0	0	0	0	93,910	595.138.710	93,910	595.138.710	98,335	0,708	Bidang Bina Marga
44		010310201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:%)	0	84.021.913.092	0	0	100	23.785.447.112	0	172.991.404	0	422.147.306	0	0	0	0	0	595.138.710	0	595.138.710	0	0,708	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
45		010310201001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	303.231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
46		010310201004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	P a n j a n g Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (Dengan Satuan:KM)	0	478.000.000	0	0	1	195.149.000	0	0	0	8.662.000	0	0	0	0	0	8.662.000	0	8.662.000	0	1,812	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
47		010310201005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	0	19.716.700.000	0	0	406,1 40	1.168.572.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
48		010310201008	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Dengan Satuan:KM)	0	45.417.286.000	0	0	2	11.100.405.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
49		010310201010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Dengan Satuan:KM)	0	15.583.431.092	0	0	3	7.594.535.000	0	0	0	49.892.800	0	0	0	0	0	49.892.800	0	49.892.800	0	0,320	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
50		010310201011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Dengan Satuan:KM)	0	0	0	0	1	2.539.327.512	0	172.991.404	0	363.592.506	0	0	0	0	0	536.583.910	0	536.583.910	0	100	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
51		010310201012	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Dengan Satuan:Jembatan)	0	2.676.496.000	0	0	240	580.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
52		010310201030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			0		0		303.697.500		0		0		0		0	0		0		0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						98,335	0,708		
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		
53	-	010312	P R O G R A M PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW (Dengan Satuan:%)	0	3.731.203.873	0	0	80	665.043.568	0	79.763.352	50	80.115.900	0	0	0	0	50	159.879.252	50	159.879.252	100	4,285	Bidang Tata Ruang
54		010312202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR (Dengan Satuan:%)	0	1.006.610.528	0	0	100	281.500.000	24,990	10.757.100	24,990	16.289.910	0	0	0	0	49,980	27.047.010	49,980	27.047.010	100	2,687	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

55		010312202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.006.610.528	0	0	1	281.500.000	1	10.757.100	1	16.289.910	0	0	0	0	2	27.047.010	2	27.047.010	100	2,687	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
56		010312203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	257.400.176	24.990	55.370.404	24.990	47.611.696	0	0	0	0	49,980	102.982.100	49,980	102.982.100	100	100	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
57		010312203003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			0		0		257.400.176		55.370.404		47.611.696		0		0		102.982.100		102.982.100		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
58		010312204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang (Dengan Satuan:%)	0	702.927.781	0	0	100	126.143.392	24.990	13.635.848	24.990	16.214.294	0	0	0	0	49,980	29.850.142	49,980	29.850.142	100	4,247	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
59		010312204004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	702.927.781	0	0	1	126.143.392	1	13.635.848	1	16.214.294	0	0	0	0	2	29.850.142	2	29.850.142	100	4,247	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,00	4,285	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
60	-	021004	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Dengan Satuan:%)	0	491.500.000	0	0	100	535.382.134	0	10.500.000	0	22.798.000	0	0	0	0	0	33.298.000	0	33.298.000	0	6,775	Bidang Pertanahan
61		021004201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penyelesaian tanah sengketa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	491.500.000	0	0	2	535.382.134	0	10.500.000	0	22.798.000	0	0	0	0	0	33.298.000	0	33.298.000	0	6,775	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan
62		021004201001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	491.500.000	0	0	10	488.382.134	0	10.500.000	0	14.798.000	0	0	0	0	0	25.298.000	0	25.298.000	0	5,147	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
63		021004201002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	0	0	0	0	2	47.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	100	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	6,775	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	

64	-	021005	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:%)	0	16.103.177.500	0	0	100	2.593.585.838	0	226.583.932	0	42.729.562	0	0	0	0	0	269.313.494	0	269.313.494	0	1,672	Bidang Pertanahan
65		021005201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian (Dengan Satuan:%)	0	16.103.177.500	0	0	100	2.593.585.838	0	226.583.932	0	42.729.562	0	0	0	0	0	269.313.494	0	269.313.494	0	1,672	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
66		021005201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	16.103.177.500	0	0	3	2.593.585.838	0	226.583.932	0	42.729.562	0	0	0	0	0	269.313.494	0	269.313.494	0	1,672	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0,000	1,672				
PREDIKAT KINERJA																				SR	SR				
67	-	021006	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	111.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pertanahan
68		021006201	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee (Dengan Satuan:SK)	0	0	0	0	2	111.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
69		021006201001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Pemerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	29.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
70		021006201002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	81.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0,000	0,000				

PREDIKAT KINERJA																			SR	SR					
71	-	021008	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	451.851.960	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	100	-
72		021008202	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	451.851.960	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	100	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
73		021008202001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi. (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	256.051.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
74		021008202002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	195.800.000	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	100	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																							49,861	19,472	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		--																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		--																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		--																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:		--																							
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 18-07-2024 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG M.AGUS SALIM. ,S.T. NIP.197407162005011008																									

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun apabila dibandingkan dari kesesuaian antara IKU kota, dokumen RENSTRA, IKU, Perkin dan RKT maka tidak dapat dikatakan sesuai. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu RPD Kota Pangkalpinang disusun isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang akan menjadi landasan penyusunan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dua tahun mendatang.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PANGKALPINANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANALISIS HASIL KEBUTUHAN			
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			54.716.944.081,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			54.716.944.081,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.114.047.153,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.114.047.153,00	
-	-			48.114.047.153,00		-			48.114.047.153,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	35,02 %	2.129.305.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	35,02 %	2.129.305.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	338,256 ha	2.129.305.000,00		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	338,256 ha	2.129.305.000,00	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									

		<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	1.518.468.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	1.518.468.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	3 Dokumen	610.837.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	3 Dokumen	610.837.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</i>	36,17 %	706.092.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</i>	36,17 %	706.092.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun</i>	100 %	706.092.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun</i>	100 %	706.092.000,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									

		<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	35 Liter/Detik	706.092.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	35 Liter/Detik	706.092.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	3.672.900.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	3.672.900.000,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.672.900.000,00		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.672.900.000,00	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
		<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan</i>	8 Unit	3.672.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan</i>	8 Unit	3.672.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</i>	90 %	235.842.610,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</i>	90 %	235.842.610,00	

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S</i>	700 rumah	235.842.610,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S</i>	700 rumah	235.842.610,00	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja									
		<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan</i>	2 Unit	175.342.610,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan</i>	2 Unit	175.342.610,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	1 Dokumen	60.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	1 Dokumen	60.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air</i>	-10 %	10.514.376.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air</i>	-10 %	10.514.376.000,00	

1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota</i>	100 %	10.514.376.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota</i>	100 %	10.514.376.000,00	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.755.181.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.755.181.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	49 Sistem Drainase Perkotaan	6.759.195.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	49 Sistem Drainase Perkotaan	6.759.195.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota</i>	30 %	7.323.184.000,00		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota</i>	30 %	7.323.184.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</i>	250 Dokumen	7.323.184.000,00		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</i>	250 Dokumen	7.323.184.000,00	

1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7.029.834.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7.029.834.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250 Dokumen	293.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250 Dokumen	293.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	94,7 %	9.414.777.200,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	94,7 %	9.414.777.200,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun	100 %	9.414.777.200,00		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun	100 %	9.414.777.200,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									

		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	2 Dokumen	201.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	2 Dokumen	201.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
		<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	403,137 KM	25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	403,137 KM	25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
		<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	1,3 KM	1.613.481.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	1,3 KM	1.613.481.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
		<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	1,7 KM	2.938.602.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	1,7 KM	2.938.602.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									

		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	1,7 KM	2.576.221.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	1,7 KM	2.576.221.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
		<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	120 KM	67.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	120 KM	67.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	1 KM	1.992.299.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	1 KM	1.992.299.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW</i>	90 %	2.377.269.994,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW</i>	90 %	2.377.269.994,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya dokumen RDTR</i>	100 %	57.100.000,00		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya dokumen RDTR</i>	100 %	57.100.000,00	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									

		<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	1 Laporan	57.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	1 Laporan	57.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR</i>	100 %	2.019.649.994,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR</i>	100 %	2.019.649.994,00	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	2.019.649.994,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	2.019.649.994,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</i>	100 %	104.500.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</i>	100 %	104.500.000,00	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									

		<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	1 Layanan	104.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	1 Layanan	104.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang</i>	100 %	196.020.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang</i>	100 %	196.020.000,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Dokumen	196.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Dokumen	196.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	65 Nilai 60.50 Nilai	11.740.300.349,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	65 Nilai 60.50 Nilai	11.740.300.349,00	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.958.980.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.958.980.000,00	

-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	1.222.327.150,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	1.222.327.150,00	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	600.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	600.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu</i>	100 %	14.400.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu</i>	100 %	14.400.000,00	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	5.550.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	5.550.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	4.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	4.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP</i>	100 %	7.246.222.199,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP</i>	100 %	7.246.222.199,00	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	58 Orang/bulan	7.246.222.199,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	58 Orang/bulan	7.246.222.199,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	1.222.327.150,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	1.222.327.150,00	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	5.420.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	5.420.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	60 Paket	161.102.150,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	60 Paket	161.102.150,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	380.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	380.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	39.655.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	39.655.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	36.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	36.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	100 %	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	100 %	0,00	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.958.980.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.958.980.000,00	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1.687.980.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1.687.980.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik perangkat daerah</i>	100 %	1.298.371.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik perangkat daerah</i>	100 %	1.298.371.000,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	43.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	43.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	27 Unit	1.255.121.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	27 Unit	1.255.121.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.602.896.928,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.602.896.928,00	
-	-			6.602.896.928,00		-			6.602.896.928,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</i>	100 %	372.429.000,00		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</i>	100 %	372.429.000,00	

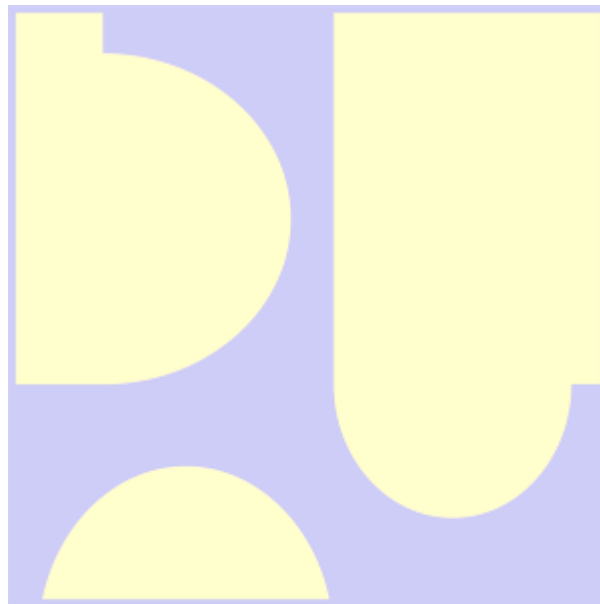
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen penyelesaian tanah sengketa</i>	2 Dokumen	372.429.000,00		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen penyelesaian tanah sengketa</i>	2 Dokumen	372.429.000,00	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Berita Acara	27.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Berita Acara	27.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Dokumen	345.229.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Dokumen	345.229.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	100 %	5.611.598.128,00		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	100 %	5.611.598.128,00	

2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian</i>	100 %	5.611.598.128,00		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian</i>	100 %	5.611.598.128,00	
2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan</i>	3 Laporan	5.611.598.128,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan</i>	3 Laporan	5.611.598.128,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	<i>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</i>	100 %	173.500.000,00		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	<i>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</i>	100 %	173.500.000,00	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee</i>	2 SK	173.500.000,00		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee</i>	2 SK	173.500.000,00	
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah									
		<i>Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	114.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	114.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah									
		<i>Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	59.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	59.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	100 %	445.369.800,00		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	100 %	445.369.800,00	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 %	445.369.800,00		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 %	445.369.800,00	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	226.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	226.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong									
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	218.469.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	218.469.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
J U M L A H				54.716.944.081,00	J U M L A H				54.716.944.081,00	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horizontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

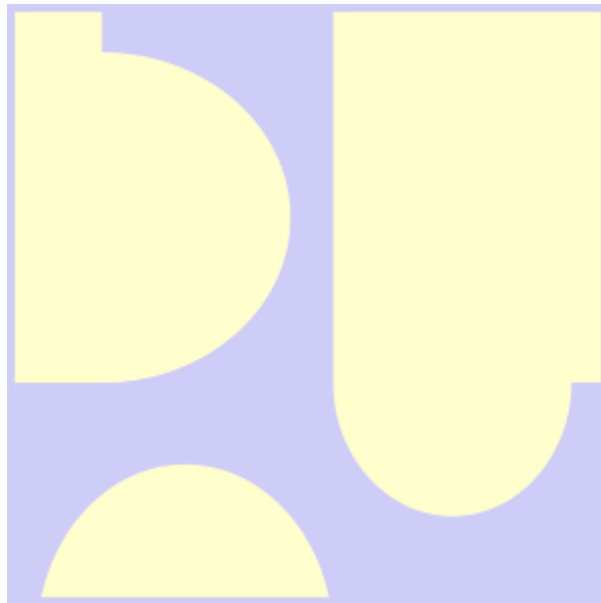
1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-: 1 (satu), 2 (dua) dan 5 (lima) yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.



3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

- a. Tujuan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :
 1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal
- b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :
 1. Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum
 2. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih
 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah
 4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang
 5. Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang

3.3 Program dan Kegiatan

Bersasarkan hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Didalam RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang akan melaksanakan 9 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program, 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

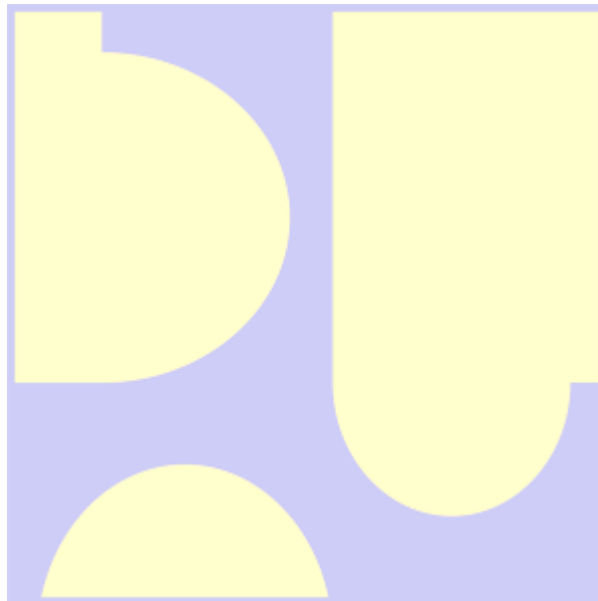
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025 mendatang akan melaksanakan 9 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 4 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1(satu) Tahun kedepan, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
- 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**
- 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**
- 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**

2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong



TABEL 4.1

Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						54.716.944.081,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.114.047.153,00							0,00	
	-	-						48.114.047.153,00							0,00	
1,	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	35,02 %			35,02 %	2.129.305.000,00						35,02 %	0,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	304,4304 ha			338,256 ha	2.129.305.000,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningk ata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	304,4304 ha	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 Unit	1.518.468.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				3 Dokumen	610.837.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2,	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</i>	36,17 %			36,17 %	706.092.000,00						36,17 %	0,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun</i>	100 %			100 %	706.092.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>				35 Liter/Detik	706.092.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	3.672.900.000,00						-	0,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	22,5 %			-	3.672.900.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	22,5 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan</i>				8 Unit	3.672.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4,	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</i>	90 %			90 %	235.842.610,00						90 %	0,00	

	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S</i>	850 rumah			700 rumah	235.842.610,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	850 rumah	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
			<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan</i>			2 Unit		175.342.610,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>			1 Dokumen		60.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5,	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air</i>	-10 %		-10 %		10.514.376.000,00						-10 %	0,00	

	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota	100 %			100 %	10.514.376.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			22 Sistem Drainase Perkotaan		3.755.181.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun			49 Sistem Drainase Perkotaan		6.759.195.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6,	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota	30 %		30 %		7.323.184.000,00						30 %	0,00	

	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	750 Dokumen			250 Dokumen	7.323.184.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	250 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.002.1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	7.029.834.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.002.3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				250 Dokumen	293.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7,	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	94,7 %			94,7 %	9.414.777.200,00						94,7 %	0,00	

1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun	100 %			100 %	9.414.777.200,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	201.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				403,137 KM	25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
		Panjang Jalan yang Dibangun				1,3 KM	1.613.481.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

	1.03.10.2.01.003 3	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1,7 KM	2.938.602.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.003 4	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,7 KM	2.576.221.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.004 3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				120 KM	67.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.004 6	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1.992.299.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

8,	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW</i>	90 %			90 %	2.377.269.994,00						90 %	0,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya dokumen RDTR</i>	100 %			100 %	57.100.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>			1 Laporan		57.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR</i>	100 %			100 %	2.019.649.994,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	2.019.649.994,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</i>	100 %			100 %	104.500.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>				1 Layanan	104.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang</i>	100 %			100 %	196.020.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				1 Dokumen	196.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	61 Nilai 70 Nilai			65 Nilai 60.50 Nilai	11.740.300.349,00						61 Nilai 70 Nilai	0,00	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.958.980.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	216.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	1.222.327.150,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		600.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %			100 %	14.400.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen		5.550.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100 %			100 %	7.246.222.199,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				58 Orang/bulan	7.246.222.199,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	1.222.327.150,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	5.420.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	161.102.150,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	380.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	39.655.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>			1 Dokumen	36.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	100 %		100 %		0,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>			0 Unit		0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %		100 %		1.958.980.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.687.980.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik perangkat daerah	100 %			100 %	1.298.371.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				27 Unit	1.255.121.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.602.896.928,00							0,00	
	-	-						6.602.896.928,00							0,00	
1,	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</i>	100 %			100 %	372.429.000,00						100 %	0,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen penyelesaian tanah sengketa</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	372.429.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	27.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	345.229.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2,	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %			100 %	5.611.598.128,00						100 %	0,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	100 %			100 %	5.611.598.128,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan</i>				3 Laporan	5.611.598.128,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	<i>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</i>	100 %			100 %	173.500.000,00						100 %	0,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee</i>	6 SK			2 SK	173.500.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	2 SK	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														
			<i>Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	114.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah														
			<i>Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	59.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

4,	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	100 %			100 %	445.369.800,00						100 %	0,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 %			100 %	445.369.800,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.			1 Laporan		226.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong			1 Dokumen		218.469.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							54.716.944.081,00								0,00

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya untuk pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingganya dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari anggaran rutin kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan

sangat diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan juga kepada semua unit organisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024-2026. sehingga tahun berikutnya target dari rencana kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

